

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dalam studi ini, penulis telah menganalisis dan mengevaluasi kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat, termasuk mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat kolaborasi. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengoptimalkan kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat dengan menggunakan teori kolaborasi Perry.

Hasil penelitian ini penulis menyatakan bahwa kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat bermanfaat dan relatif berhasil. Hal ini dapat dilihat dari beberapa temuan utama, yaitu: (1) adanya tata kelola kolaborasi lintas sektor yang didukung oleh kebijakan Pemerintah Kota Bogor dengan kebijakan Surat Edaran tentang PENTING-LUR; (2) pembagian peran dan mekanisme administrasi yang relatif jelas antar perangkat daerah, kecamatan, kelurahan, PLKB, dan kader TPK; (3) terjaganya otonomi organisasi masing-masing aktor tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi kelembagaan; (4) terbangunnya hubungan saling ketergantungan dan manfaat antar aktor dalam rantai distribusi dan pendampingan sasaran; serta (5) kuatnya nilai kepedulian sosial, kepercayaan, dan komitmen aktor dalam mendukung keberlangsungan program.

Namun, penulis menyatakan ada kelemahan dalam program ini. Hal ini disebabkan oleh masih adanya keterbatasan pada aspek distribusi pelaksanaan,

terutama terkait ketepatan waktu dan kesinambungan pengiriman telur dari perangkat daerah, aspek keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan, serta transparansi pelaporan karena belum terlembagakannya kolaborasi secara formal dalam regulasi yang lebih mengikat.

Adapun faktor pendukung dan penghambat kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat dapat disimpulkan sebagai berikut. Faktor pendukung utama kolaborasi adalah dimensi nilai, kepercayaan, dan komitmen. Dimensi ini menjadi modal sosial utama yang memungkinkan kolaborasi tetap berjalan meskipun program dilaksanakan secara sukarela dan di luar mekanisme anggaran formal. Sementara itu, faktor penghambat kolaborasi terutama berkaitan dengan aspek ketergantungan, khususnya keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kecamatan serta tingginya ketergantungan terhadap konsistensi dan ketepatan waktu kontribusi dari perangkat daerah, yang berdampak langsung pada kelancaran pelaksanaan program di tingkat wilayah.

5.2. Implikasi Teori

Penelitian ini memberikan implikasi teoretik bahwa teori kolaborasi Perry mampu menjelaskan secara komprehensif praktik kolaborasi lintas sektor dalam penanganan *stunting* melalui program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat. Berikut implikasi teori kolaborasi yang dikemukakan oleh Perry terhadap penelitian ini:

Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa dimensi nilai, kepercayaan, dan komitmen (*norms*) merupakan penggerak utama kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat. Kolaborasi dalam program ini dapat berjalan relatif baik meskipun tidak didukung oleh

mekanisme anggaran formal, *reward*, maupun *punishment*. Kondisi tersebut memperkuat argumen Perry bahwa kolaborasi publik dapat bertahan dan berfungsi secara efektif ketika ditopang oleh kesamaan nilai, tingkat kepercayaan antar aktor, serta komitmen kolektif terhadap tujuan bersama. Dalam konteks penelitian ini, nilai kepedulian sosial dan solidaritas menjadi modal sosial yang memungkinkan aktor lintas sektor tetap berkontribusi secara sukarela dan konsisten.

Sebaliknya, penelitian ini juga memberikan implikasi teoretik penting terkait dimensi ketergantungan dan manfaat (*mutuality*), yang dalam praktik justru menjadi titik lemah kolaborasi. Tingginya ketergantungan antar aktor khususnya ketergantungan kecamatan dan kelurahan terhadap konsistensi pengiriman telur dari perangkat daerah menunjukkan bahwa *mutuality* tidak selalu menjadi kekuatan kolaborasi apabila tidak diimbangi dengan mekanisme pengelolaan risiko. Temuan ini memperkaya teori Perry dengan menunjukkan bahwa hubungan saling ketergantungan dapat menjadi sumber kerentanan kolaborasi ketika salah satu aktor mengalami keterbatasan komitmen.

Implikasi teoretik lainnya menunjukkan bahwa dimensi tata kelola (*governance*), administrasi (*administration*), dan otonomi organisasi (*organizational autonomy*) dalam program PENTING-LUR berfungsi sebagai faktor pendukung kontekstual, namun bukan sebagai penentu utama keberhasilan kolaborasi. Tata kelola yang berjenjang, sistem administrasi yang relatif tertata, serta adanya ruang otonomi bagi masing-masing aktor mampu menjaga stabilitas pelaksanaan program, tetapi tidak secara otomatis menjamin keberlanjutan kolaborasi tanpa dukungan dimensi normatif yang kuat.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa dalam kolaborasi penanganan masalah sosial yang bersifat kompleks seperti *stunting*, dimensi *norms* memiliki posisi sentral dalam menggerakkan dan mempertahankan kolaborasi, sementara dimensi *mutuality* perlu dikelola secara lebih adaptif agar tidak menjadi hambatan struktural. Temuan ini memberikan kontribusi teoretik dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara modal sosial dan desain kolaborasi dalam kerangka teori kolaborasi Perry, khususnya pada konteks pemerintahan daerah dan program berbasis kesukarelaan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kolaborasi penanganan *stunting* dalam tata kelola program PENTING-LUR di Kecamatan Bogor Barat, maka beberapa rekomendasi kebijakan dan praktis yang dapat diberikan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor adalah sebagai berikut:

- 1) Pada level pemerintah daerah, disarankan adanya penguatan kerangka kebijakan kolaboratif PENTING-LUR agar tidak sepenuhnya bergantung pada nilai kesukarelaan. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman teknis atau skema insentif non-finansial sebagai upaya menjaga keberlanjutan kolaborasi tanpa menghilangkan karakter partisipatif dan nilai kepedulian sosial yang telah terbentuk.
- 2) Pada level perangkat daerah, khususnya perangkat daerah pengirim telur, diperlukan peningkatan komitmen terhadap konsistensi kontribusi dan ketepatan waktu distribusi. Perangkat daerah perlu menjadikan program PENTING-LUR sebagai bagian dari tanggung jawab sosial kelembagaan, bukan semata-mata kegiatan tambahan, sehingga dinamika internal seperti